

**PERAN PEREMPUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



**Oleh:
RYAN NOVLI
1201834/2012**

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGIFAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

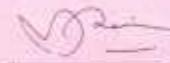
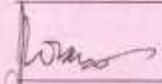
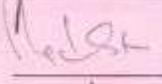
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 31 Juli 2017

PERAN PEREMPUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DI KOTA PADANG

Nama : Ryan Novli
BP/NIM : 2012/1201834
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2017

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Erda Fitriani, S.Sos., M.Si	
2. Sekretaris	: Delmira Syafrini, S.Sos., MA	
3. Anggota	: Nora Susilawati, S.Sos., M.Si	
4. Anggota	: Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si	
5. Anggota	: Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D	

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

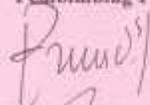
PERAN PEREMPUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DI KOTA PADANG

Nama : Ryan Novli
BP/NIM : 2012/1201834
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2017

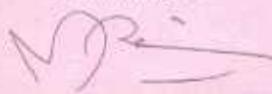
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Erda Fitriani, S.Sos., M.Si
NIP. 19731028 200604 2 001

Pembimbing II



Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
NIP. 19830518 200912 2 004

Mengetahui,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Novli
Bp/Nim : 2012/1201834
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Perempuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang" adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dan hasil karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya siap diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Juli 2017

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi

Nora Susilawati S. Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan

Ryan Novli
NIM: 1201834/2012

ABSTRAK

Ryan Novli. 1201834/2012.Peran Perempuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Peran perempuan Satpol PP di Kota Padang).Skripsi.Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran yang dilakukan oleh perempuan ketika bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang. Khususnya di Kota Padang, didapatkan data bahwa terhitung dari tahun 2012 jumlah penerimaan personil Satpol PP perempuan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan adanya perubahan dalam hal pemilihan profesi, yang mana sebelumnya dalam lembaga Satpol PP hanya mempekerjakan laki-laki, namun pada saat ini juga mempekerjakan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa diperlukan peran dari perempuan untuk menjalankan tugas sebagai Satpol PP

Penelitian ini di analisis dengan teori yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft mengenai feminisme liberal. Feminisme yang merupakan sistem ide yang digeneralisasi, meliputi banyak hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita, di dalam dua cara. Pertama, titik tolak semua penyelidikan itu adalah situasi (atau situasi-situasi) dan pengalaman-pengalaman wanita di dalam masyarakat. Kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan wanita.

Penelitian ini dilakukan pada bulan April dan Maret 2017, melalui pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang tepatnya di Kantor Satpol PP yang berlokasi di Jalan Tan Malaka No.36 C. Pemilihan informan dilakukan secara *Purposive Sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 28 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi terbatas, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Untuk memperoleh keabsahan data dilakukan triangulasi data. Triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini dianalisis dengan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa peran perempuan satpol PP yaitu: 1) Untuk perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP di kantor, tidak terdapat perbedaan pekerjaan terhadap perempuan. Jadi, baik Satpol PP laki-laki maupun Satpol PP perempuan mengerjakan tugasnya disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 2) Untuk perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP di lapangan terdapat perbedaan peran gender diantaranya yaitu : a) Perempuan yang bekerja di lapangan di minta untuk menghadapi pihak perempuan juga karena dianggap jika menghadapi sesama perempuan maka Satpol PP perempuan akan mudah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan di lapangan. b) Perempuan juga dianggap memiliki peran sebagai negosiator, sosialisasi dan mediasi dimana perempuan lebih mudah untuk memberikan pengertian. Hal ini disebabkan karena peran gender perempuan yang memiliki sikap lembut, sabar dan sopan sehingga dapat melakukan negosiasi dengan pendekatan yang membuat pihak yang akan ditertibkan dapat lebih mengerti dan memahami sehingga pihak tersebut sadar akan kesalahannya

Kata Kunci : Peran Gender, Perempuan, Satpol PP

KATA PENGANTAR



Terlebih dahulu penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perempuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Peran perempuan Satpol PP di Kota Padang)”. Shalawat serta doa juga penulis ucapkan untuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan aman dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) di Jurusan Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua penulis beserta keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan, semangat dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini
2. Ibu Nora Susilawati S.Sos, M.Si, ketua Jurusan Sosiologi dan ibu Ike Sylvia, S.IP, M.Si, selaku sekretaris jurusan yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan ibu staf pengajar pada jurusan Sosiologi yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama ini
4. Ibu Nora Susilawati S.Sos., M.Si, Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si, dan Ibu Selinaswati, S.Sos, MA, Ph.,D sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini

5. Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., selaku dosen PA penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang
6. Bapak dan Ibu staf tata usaha FIS UNP, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini
7. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu penulis dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini dan teman-teman yang satu perjuangan di ujung gelar sarjana ini.
8. Semua informan dan masyarakat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya para informan peneliti.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin

Padang, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Kerangka teori.....	8
F. Kerangka Konseptual.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	18
1. Lokasi Penelitian.....	18
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	18
3. Teknik Pemilihan Informan	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
a. Observasi	20
b. Wawancara	21
c. Studi Dokumentasi	22
5. Triangulasi Data.....	22
6. Analisis Data	22
BAB II SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG	
A. Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP di Kota Padang	25
B. Visi dan Misi Satpol PP	25
C. Susunan Organisasi	26
D. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP	27
E. Data Kenaggotaan Satpol PP	49

BAB III PERAN PEREMPUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KOTA PADANG

A. Perempuan Satpol PP yang bertugas di Lapangan.....	53
1. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar.....	53
a. Negosiasi dengan PKL	55
b. Pengusiran PKL.....	59
2. Patroli Keliling.....	63
a. Pelajar cabut	63
b. Penertiban Pengemis	66
3. Penertiban Kawasan Objek Wisata	69
4. Razia di tempat maksiat	73
5. Pengamanan Event.....	80
B. Satpol PP perempuan bertugas di Kantor	83
1. Staf Bagian Kepegawaian	84
2. Staf Bagian Umum.....	86
3. Staf Bagian Keuangan.....	88
4. Staf Bagian Linmas	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Se-Sumatera Barat Keadaan Desember Tahun/2015.	4
Tabel 2. Jumlah penerimaan Satpol PP perempuan di Kota Padang tahun 2012-2016.....	5
Tabel 3. Rekap Peserta Seleksi Rekrutmen 15 Februari s/d 18 Febuari 2016.....	6
Tabel 4. Data keangotaan Satpol PP Kota Padang	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif Dari Miles dan Huberman	24
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Pedoman Observasi
- Lampiran 3. Daftar Nama Informan Penelitian
- Lampiran 4. Surat tugas pembimbing
- Lampiran 5. Surat Rekomendasi penelitian dari kesbangpol
- Lampiran 6. Surat Edaran Perintah Bongkar
- Lampiran 7. Surat Pernyataan Pelajar Cabut
- Lampiran 8. Surat pernyataan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- Lampiran 9. Dokumentasi Pribadi Terkait dengan Temuan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian kerja secara seksual disebut juga pembagian kerja yang didasarkan atas jenis kelamin. Dikebanyakan masyarakat ada pembagian kerja seksual yang beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lainnya semata-mata dilakukan oleh laki-laki. Dalam literatur studi perempuan sering digunakan istilah jender. Jender yang dimaksudkan disini adalah keadaan individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan, memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas disetiap masyarakat ini membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja seksual yang berbeda.¹

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat, posisi perempuan di dunia kerja juga semakin mendapat tempat dan peluang. Perempuan yang semula hanya dapat bekerja dan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga saja, tetapi kini telah dapat bekerja dan memasuki dunia kerja di luar lingkup rumah tangganya.² Masalah perempuan bekerja masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Bagaimanapun masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja pada

¹ Ratna Saptari & Brigitte Holzner, 1997. *Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Anem Kosong anem. Hal 21

² Nauria Alghaasyiyah. 2014. "Kontribusi Perempuan Pemulung dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga". *Jurnal*. Universitas Bengkulu

sektor publik dan istri bekerja pada sektor domestik dengan berbagai pekerjaan rumah.³

Masyarakat berpendapat bahwa perempuan hanya mempunyai tugas dan kewajiban mengurus kepentingan didalam lingkungan rumah tangga, yang tidak perlu bekerja secara profesional diluar tugas tersebut. Perempuan bukanlah pencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah laki-laki atau suami. Meskipun perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai, perempuan tetap berstatus membantu suami.⁴

Meskipun begitu, saat ini berpenghasilan yang cukup pada kehidupan tidaklah mudah, berbagai tuntutan harus dilakukan dalam upaya untuk memenuhinya, terutama dalam segi ekonomi. Berbicara mengenai ekonomi, maka tidak akan jauh dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhan ini perempuan yang semula ditempatkan dalam sektor domestik, sekarang tidak lagi bisa hanya mengharapkan laki-laki saja. Kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan perempuan mulai memasuki sektor publik. Sektor publik yang biasanya dominan dengan laki-laki kini telah mulai dimasuki oleh kaum perempuan. Perempuan pada awalnya hanya bekerja disektor yang bersifat melayani seperti pelayan toko, perawat, dan bagian-bagian administrasi lainnya.⁵ Namun dengan perkembangan, perempuan mulai memasuki sektor yang bersifat jasa seperti tukang ojek, sopir bahkan juga berada di dalam sektor layanan masyarakat serta keamanan masyarakat yaitu menjadi personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

³Siregar, Mastauli. " Keterlibatan Ibu bekerja dalam perkembangan pendidikan anak" .Harmoni Sosial, September 2007, Volume II, No. 1.diakses pada tanggal 7 November 2016.

⁴Kanjeng, Ratu Hemas Gusti. 1992. *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi*. Yogyakarta.

⁵Saptiawan, Sugiahastuti Istnahadi. 2007. *Gender dan inferioritas perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 57

Satpol PP merupakan suatu profesi yang bertugas di bidang keamanan dan penertiban. Saat ini, tidak hanya laki-laki yang memasuki ranah dalam hal keamanan dan ketertiban sebagaimana yang dilakukan oleh Satpol PP. Perempuan juga dibutuhkan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perempuan yang bekerja sebagai satpol PP terbagi menjadi dua: *Pertama*, bekerja di kantor seperti pekerjaan administrasi. *Kedua*, perempuan yang bekerja di lapangan, dalam upaya penertiban di lapangan tidak jarang dilakukan dengan cara yang keras atau mendapat perlawanan dari masyarakat yang ditertibkan. Masuknya perempuan dalam Satpol PP memberikan warna baru bagi masyarakat, perempuan sebelumnya identik di sektor domestik saja kini berada dalam suatu profesi untuk menciptakan keamanan dalam masyarakat.

Mengenai tugas Satpol PP dalam hal menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tidak terlepas dari penggunaan kekuatan fisik seperti meruntuhkan dan membongkar bangunan semi permanen yang dibangun oleh pedagang. Dalam melakukan penertiban razia penyakit masyarakat petugas Satpol PP juga tidak terlepas aksi kejar-kejaran dalam upaya menangkap pelaku pelanggaran.⁶

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang membutuhkan lembaga Satpol PP dalam rangka agar terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakatnya. Setiap Kota/Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat tentu memiliki jumlah anggota yang berbeda. Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel jumlah personil Satpol PP di Sumatera Barat:

⁶Wawancara dengan Ria Kurniati julsani (23 tahun) tanggal 03 Januari di kantor satpol PP kota padang

Tabel 1. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Se-Sumatera Barat Keadaan Desember Tahun/2015.

No	Daerah	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Pasaman	28	73	101
2	Pasaman Barat	23	158	181
3	Lima Puluh Kota	50	68	118
4	Tanah Datar	45	1	46
5	Agam	56	90	146
6	Padang Pariaman	41	45	86
7	Solok	31	71	102
8	Solok Selatan	28	140	168
9	Dharmasraya	30	113	143
10	kep. Mentawai	13	73	86
11	Pesisir Selatan	33	60	93
12	Sijunjung	48	73	86
13	Payakumbuh	40	68	108
14	Bukit Tinggi	80	25	105
15	Padang	111	307	418
16	Padang Panjang	43	89	132
17	Pariaman	74	13	87
18	Sawahlunto	41	40	81
19	Solok	57	14	71
Jumlah				2.358

Sumber: Data Arsip Kantor Satpol PP Sumatera Barat.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang merupakan daerah yang paling banyak memiliki jumlah personil Satpol PP dibandingkan daerah lain. Jumlah personil yang terdapat di Kota Padang adalah sebanyak 418 orang, adapun daerah yang memiliki jumlah personil paling sedikit adalah Kabupaten Tanah Datar yaitu hanya sebanyak 46 orang. Secara keseluruhan jumlah personil Satpol PP di Sumatera Barat yaitu sebanyak 2.358 orang. Personil Satpol PP tersebut terdiri dari personil laki-laki dan ada juga personil perempuan.

Khususnya di Kota Padang, didapatkan data bahwa terhitung dari tahun 2012 jumlah penerimaan personil Satpol PP perempuan mengalami peningkatan

sampai dengan tahun 2016. Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel jumlah penerimaan personil Satpol PP perempuan.

Tabel 2. Jumlah penerimaan Satpol PP perempuan di Kota Padang tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Penerimaan
1	2012	3
2	2013	7
3	2014	10
4	2015	10
5	2016	10

Sumber: Data arsip Kantor Satpol PP di Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jumlah penerimaan Satpol PP perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari 3 orang menjadi 7 orang di tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami jumlah penerimaan tetap yaitu 10 orang.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kepala Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Padang yaitu Ibu Rina, data keseluruhan anggota Satpol PP di Kota Padang pada tahun 2016 yaitu berjumlah 506 orang. Adapun anggota Satpol PP yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) 104 orang, tenaga honor 5 orang, tenaga kontrak Pemerintah Kota Padang 7 orang, dan kontrak pemula 350 orang (30 perempuan-220 laki-laki), serta linmas 40 orang. Sedangkan dari data yang didapatkan pada bulan Maret 2017, jumlah personil Satpol PP di Kota Padang yaitu 451 orang, 50 Satpol PP perempuan dan 401 laki-laki.

Tahun 2016, dilakukan seleksi penerimaan anggota Satpol PP yang dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari. Berikut ini akan diuraikan dalam bentuk tabel jumlah peserta seleksi penerimaan tenaga kerja Satpol PP di Kota Padang.

Tabel 3.Rekap Peserta Seleksi Rekrutmen 15 Februari s/d 18 Febuari 2016

No	Uraian	Pleton Pria	Pleton Perempuan	Driver	Jumlah
1	Hari I (15 Feb 2016)	154	29	12	195
2	Hari II (16 Feb 2016)	113	24	8	145
3	Hari III (17 Feb 2016)	67	15	6	88
4	Hari IV (18 Feb 2016)	82	18	1	101
Jumlah		416	86	27	529

Sumber: Data Arsip Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas terdapat pendaftaran peserta seleksi rekrutmen anggota Satpol PP Kota Padang secara keseluruhan berjumlah 529 orang. Adapun jumlah peserta seleksi untuk posisi pleton pria yaitu 416 orang, sedangkan untuk peserta seleksi pada posisi pleton perempuan berjumlah 86 orang. Adapun jumlah pleton perempuan yang dibutuhkan pada tahun 2016 yaitu berjumlah 10 orang. Data di atas memperlihatkan bahwa pada saat ini tingginya minat perempuan untuk menjadi pesonil Satpol PP khususnya di Kota Padang. Hal tersebut juga sejalan dengan kebutuhan akan pentingnya peran Satpol PP perempuan dalam hal keamanan dan ketertiban, sehingga terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Bertambahnya jumlah personil Satpol PP perempuan tersebut tentu membentuk pembagian kerja antara Satpol PP laki-laki dan perempuan, terutama bagi personil Satpol PP yang bertugas di lapangan.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh Roy Martin (2008) yang berjudul Implementasi Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan dan Penertiban oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang). Dalam penelitian ini masalah yang ditemukan masih terdapat kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban,

sehingga perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan untuk mencapai hasil yang maksimal.⁷

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Fedi Bhakti Patria, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Satpol PP Cantik: Spekularisasi Perempuan dalam Fantasi Maskulinitas. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa istilah cantik yang disematkan pada Satpol PP cantik, tidak lain hanya proses spekulisasi dari dominasi maskulin yang berkorporasi dengan industri media sebagai *relation of rulling*.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam dan ilmiah mengenai peran yang dilakukan oleh perempuan ketika menjadi Satpol PP. Hal tersebut mengingat adanya perubahan dalam hal pemilihan profesi, yang mana sebelumnya dalam lembaga Satpol PP hanya mempekerjakan laki-laki, namun pada saat ini juga mempekerjakan perempuan terutama yang bertugas di lapangan. Selain itu, dapat dilihat bahwa penerimaan personil Satpol PP perempuan juga meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini diperlukan peran dari perempuan untuk menjalankan tugas dari Satpol PP. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Perempuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Padang

⁷Roy Martin. 2008. Implementasi Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan dan Penertiban oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang). *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.

⁸Fedi Bhakti Petria. Satpol PP Cantik: Spekularisasi Perempuan Dalam Fantasi Maskulinitas. *Jurnal*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi fokus penelitian pada peran perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) biasanya hanya ditempati oleh kaum laki-laki, namun saat ini ditemukannya data perempuan juga bekerja sebagai Satpol PP. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana peran yang dilakukan oleh perempuan ketika bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan peran yang dilakukan oleh perempuan ketika bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat: (1) Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan literatur pembaca tentang sosiologi gender/antropologi gender yang terkait dengan analisis genderbekerja sebagai anggota Satpol PP Di Kota Padang. (2) Secara praktis, adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan terhadap lembaga Satpol PP Di Kota Padang sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemerintah Kota Padang dalam mengambil kebijakan.

E. Kerangka Teori

Dalam mengkaji fenomena Satpol PP peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mary Wollstonecraft mengenai feminisme liberal, Feminisme yang merupakan sistem ide yang digeneralisasi, meliputi banyak hal tentang

kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita, di dalam dua cara. Pertama, titik tolak semua penyelidikan itu adalah situasi (atau situasi-situasi) dan pengalaman-pengalaman wanita di dalam masyarakat. Kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan wanita.⁹ Artinya, teori feminisme berpusat pada segala hal yang menjadi aktivitas wanita, yang acuannya merujuk kepada konstruksi masyarakat terhadap wanita. Maka, di didalam konstruksi masyarakat terhadap wanita terdapat posisi khas yang sebenarnya menguntungkan wanita.

Berangkat dari posisi wanita dalam masyarakat yang telah terkonstruksikan, feminisme mencoba mempertanyakan dengan pertanyaan sederhana yang sedikit menipu¹⁰: “*Dan bagaimana dengan wanita?*”, “*Mengapa semua hal begini?*” dan “*Bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial untuk membuatnya menjadi tempat yang adil bagi semua orang?*”. Maka, dalam pertanyaan itu terciptalah makna yang menurut peneliti adanya ketidakadilan dalam dunia sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat untuk wanita. Tentunya wanita mendapatkan ketidakbebasan dalam mengorganisir dirinya menjadi seperti yang ia inginkan di dalam masyarakat. Sehingga menurut teori feminisme, adanya ketidaksetaraan gender, yang berarti mengklaim wanita secara situasional kurang berdaya dibandingkan pria untuk mewujudkan kebutuhan untuk aktualisasi diri yang sama-sama dimilikinya dengan pria. Hal inilah yang dibantah oleh kaum feminis liberal terutama dalam sektor pekerjaan.

⁹George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit. Hal 773.

¹⁰George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit. Hal 774

Feminisme liberal, beragumen bahwa wanita dapat mengklaim kesetaraan dengan pria berdasarkan suatu kecakapan manusia yang hakiki untuk menjadi agensi moral yang bernalar, bahwa ketidaksetaraan gender adalah hasil dari pemulaan berdasarkan seks pembagian kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dihasilkan dengan mengubah pembagian kerja melalui pemolaan kembali lembaga-lembaga kunci – hukum, kerja, keluarga, pendidikan, dan media. Maka artinya feminisme liberal dengan membebaskan wanita mengisi tempat yang biasanya diduduki oleh pria, disitulah terciptanya kesetaraan gender.

Feminisme liberal melihat bahwa gender sebagai suatu sistem stratifikasi yang menghasilkan pembagian kerja bergender, suatu pengorganisasian masyarakat ke dalam lingkup publik, privat dan suatu dimensi kultural ideologi seksis. Pembagian kerja di dalam masyarakat-masyarakat modern membagi produksi baik dari segi gender maupun lingkungan yang ditandai sebagai “publik” dan “privat”. Wanita diberi tanggung jawab terutama untuk lingkupan privat. Pria diberi akses yang istimewa kepada lingkungan publik (yang dilihat oleh para feminis liberal sebagai lokus dari imbalan-imbalan sebenarnya kehidupan sosial – uang, kekuasaan, status, kebebasan, kesempatan-kesempatan untuk pertumbuhan dan kepercayaan pada diri).

Fakta bahwa wanita mempunyai akses yang mereka butuhkan untuk lingkungan publik, tentu saja, adalah suatu kemenangan yang dicapai gerakan wanita, dan gerakan feminisme liberal, sebagaimana fakta bahwa wanita merasa dapat mengajukan beberapa tuntutan kepada pria untuk membantu di dalam pekerjaan di lingkungan privat. Kedua lingkungan itu senantiasa berinteraksi di dalam kehidupan wanita (lebih banyak dibanding pria), dan kedua lingkungan itu

masih dibentuk oleh ideologi patriarkis dan seksisme, yang juga masih meresap di dalam media massa kontemporer.

Relevansinya dengan penelitian ini sebagaimana yang kita sebutkan di atas adalah bagaimana konstruksi yang dibangun masyarakat terhadap kedudukan pria dan wanita di masyarakat. Satpol PP yang dahulunya di konstruksikan oleh masyarakat sebagai sebuah pembagian kerja yang hanya akan di organisasikan oleh laki-laki, dikarenakan pekerjaan Satpol PP sangat membutuhkan sebuah kesan maskulinitas, yaitu agresivitas, keberanian, kepemimpinan, dan kekuatan fisik, yang sejatinya hanya dimiliki oleh laki-laki.

Hal yang demikian itu sekarang mengalami pergeseran. Satpol PP sekarang telah dapat dimasuki oleh kaum wanita. Wanita yang memiliki ciri feminitas yaitu, kelembahlembutan, keengganan untuk menampilkan diri, dan kehalusan, telah mampu mengorganisasikan dirinya sebagai Satpol PP. Hal ini jelas lahir dari feminis liberal yang menentang pandangan biologisme di mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dianggap berpangkal pada perbedaan biologis, sehingga melahirkan ketimpangan sosial atas dasar gender.

Satpol PP wanita yang ada saat sekarang ini merupakan penghapusan dari diskriminasi yang telah berlangsung lama melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Satpol PP wanita harus memiliki jenjang pendidikan terakhir adalah SMA untuk masuk ke dalam test Satpol PP, sehingga pembukaan kesempatan kerja untuk wanita terbuka sangat lebar. Maka inilah yang dikatakan oleh feminisme liberal bahwa manusia itu perbedaannya bukan berdasarkan biologis, tetapi berdasarkan kecakapan manusia itu sendiri.

F. Kerangka Konseptual

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah peran dari personil Satpol PP perempuan.

2. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984: 237).

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan berperilaku secara tertentu.

¹¹Roy Martin. 2008. Implementasi Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Pengawasan dan Penertiban oleh Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Padang). *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapat dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Perandidayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, perandidayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan

pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003),

Sosiologi yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "life-course" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

"Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntunkita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)".

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar

seseorang/organisasi tidak berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraannya, seperti Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat yang memiliki tujuan dalam fasilitasi Pilkada di Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan salah satu pelayanan publik yang pemerintah berikan.

3. Jender

Jender adalah keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas di setiap masyarakat ini membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja seksual yang berbeda.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan jender yaitu pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP.

Terdapat dua teori untuk melihat perbedaan antar gender dan jenis kelamin, yakni teori Nature dan teori Nurture¹³. Teori Nature menganggap bahwa perbedaan psikologis antar laki-laki dan perempuan diakibatkan karena adanya faktor-faktor biologis. Sedangkan teori Nurture menganggap bahwa perbedaan tersebut terbentuk karena adanya proses belajar dari lingkungan di mana mereka tinggal.

¹²Ratna Saptari Dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm 21.

¹³Arif budiman. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia.

Arief Budiman melihat persoalan pembagian kerja secara seksual merupakan sebuah persoalan yang sangat penting, karena persoalan eksploitasi separuh dari umat manusia yang lain. Persoalan ini begitu sempurna tersembunyi, meskipun umurnya sudah ribuan tahun, baru akhir-akhir ini persoalan mendapatkan semestinya¹³

Mengutip dari pendapat Budiman menyebutkan, ada tiga macam realitas dalam kehidupan:

- a. Realitas seksual yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- b. Realitas ekonomi, terdiri dari kapital dengan kelas bawah.
- c. Realitas kebudayaan, terdiri dari teknologi dan estetika.

Pembagian kerja secara seksual sudah berlangsung ribuan tahun, karena itu orang cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang alamiah¹³

Berbicara mengenai gender tidak bisa lepas dari identitas seksual, dan pengembangan peran gender juga bertolak dari perbedaan seksual. Laki-laki dan perempuan memang sudah beda dan dibedakan sejak awal kehidupannya. Sejak sang bayi lahir ke bumi, hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh ayah-ibu dan sanak keluarga, pertama-tama adalah, "laki-laki atau perempuan?" Bahkan sebelum lahir pun orang tua ingin memastikan jenis kelamin anaknya lewat pesawat ultrasonography.

Memahami konsep gender tentu perlu dibedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan sifat atau pembagi dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Mansour Fakih, 2010: 8). Artinya secara biologis alat-alat yang melekat pada

perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki-laki seperti penis, kalamening, dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

3. Perempuan

Perempuan adalah manusia yang pada hakikatnya memiliki sifat yang lemah lembut, emosional dan keibuan.¹⁴ Perempuan merupakan makhluk atau manusia lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Perbedaan secara fisiologis dengan laki-laki menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, timbul juga perbedaan pada hal kemampuan. Kartini Kartono mengatakan bahwa perbedaan fisiologis pada umumnya diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial ekonomi, dan pengaruh pendidikan. Menurut Mansour Fakih dalam konsep jendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat pada perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, kasih sayang, sopan, emosional dan keibuan serta perlu perlindungan. Padahal sifat tersebut dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Jadi, perempuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

¹⁴Marginalisasi Kaum Perempuan, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, dalam wordpress.com (diakses tanggal 8 Juni 2017)

¹⁵Pengertian perempuan, dalam tulisanterkini.com (diakses tanggal 8 Juni 2017)

perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP perempuan dan melihat dari peran perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang tepatnya di Kantor Satpol PP yang berlokasi di Jalan Tan Malaka No. 36 C. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan dimana perempuan Satpol PP bertugas. Seperti di Pasar. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kerja dan peran perempuan Satpol PP di Lapangan, dalam artian untuk menertibkan masyarakat yang tidak mentaati peraturan. Lokasi ini dipilih karena penulis melihat adanya peningkatan peminatan Satpol PP oleh perempuan dari 5 (lima) tahun terakhir dan Kota Padang juga merupakan daerah yang memiliki personil Satpol PP yang paling banyak di Provinsi Sumatera Barat. Alasan lain memilih lokasi penelitian yaitu perubahan konstruksi peran perempuan sebagai pemenuhan kebutuhan domestik. Saat ini perempuan juga sudah memasuki ranah publik, salah satunya menjadi Satpol PP, yang mana Kota Padang merupakan jumlah Satpol PP terbanyak dari seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian kualitatif ini dapat diperoleh informasi secara lisan berupa ucapan langsung dari masyarakat. Sehingga dapat mengungkap permasalahan yang lebih

tajam dan mendalam, serta akan memperoleh data yang lebih akurat dan dapat memperoleh data sebanyak mungkin dari informan melalui pertanyaan yang diajukan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan membuat gambaran, deskripsi dan lukisan yang sistematis, dan akrab mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶ Pendekatan ini digunakan karena pendekatan kualitatif dapat membantu meningkatkan pemahaman bagi peneliti dalam memahami alasan peran perempuan yang bekerja sebagai Satpol PP.

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah studikusus yaitu penelitian yang mendetail mengenai sebuah kasus tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan sebuah kasus dalam sebuah konteks natural. Peneliti memilih pendekatan ini karena ingin mengungkapkan secara mendalam terkait dengan peran yang dilakukan oleh perempuan ketika bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang.

3. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposivesampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan secara sengaja dipilih berdasarkan tujuan penelitian.¹⁷ Purposive sampling merupakan cara menentukan kriteria informan yang kompeten dalam hal data dan informasi tertentu.¹⁸ Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu: (1) Satpol

¹⁶Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bandung. Bumi Aksara.

¹⁷Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES

¹⁸Arief Subyantoro dan FX. Suwanto. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

PP perempuan (2) Keluarga Satpol PP perempuan (3) pegawai kantor, dan (4) Satpol PP laki-laki. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 28 orang.

4. Pengumpulan Data

Agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan baik, maka teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti atau cara untuk mengumpulkan data di lapangan yang dilakukan dengan melihat atau mengamati secara langsung untuk memperoleh data yang akurat.¹⁹ Observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *observasi partisipasi terbatas*, dimana kehadiran penulis dilokasi diketahui oleh informan, pengamatan yang dilakukan diketahui oleh subjek penelitian.²⁰

Dalam melakukan observasi penulis juga melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang di rasa perlu dengan menggunakan alat observasi yaitu berupa catatan lapangan yang dibawa setiap kali turun kelapangan. Dalam observasi peneliti mengamati dan melihat aktivitas anggota Satpol PP seperti pekerjaan di kantor serta pelaksanaan tugas untuk pengurusan pedagang kaki lima dan juga melakukan razia di tempat maksiat seperti warung remang-remang dan hotel. Selain itu Satpol PP juga melakukan patroli kelilinga untuk menertibkan pelajar

¹⁹Basrowi & Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta

²⁰MT. Felix Sitorus, 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Pengenalan*. Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial

yang cabut dan pengemis di jalanan. Peneliti juga mengamati kapan waktu dan di mana Satpol PP melaksanakan tugas.

Dalam melakukan observasi, penulis tidak mengalami kesulitan karena pihak yang terkait yaitu personil Satpol PP sangat terbuka dalam membagi informasi kepada penulis, begitu juga saat penulis melakukan observasi di lapangan. Adapun kemudahan dari observasi yang penulis lakukan yaitu penulis bisa datang langsung ke tempat Satpol PP perempuan bertugas seperti di pasar dan kawasan wisata. Sehingga penulis bisa mengamati dengan seksama tugas dari Satpol PP perempuan di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.²¹ Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu dengan mengajukan pertanyaan penelitian kepada informan. Peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan sehingga dapat mengungkap fakta.

Wawancara mendalam ini dilakukan secara intensif dan berulang untuk mendapatkan data yang lengkap dan detail dengan pertanyaan yang telah disusun.²² Alat yang digunakan dalam proses wawancara adalah daftar pertanyaan, dan pedoman wawancara agar fokus dalam prosesnya. Jawaban dari informan akan diikuti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam, sehingga

²¹Basrowi & Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta

²²Burhan Bungin. 2012. *Metode penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis kerah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 156

diperoleh informasi sedetail mungkin dari informan. Hasil wawancara dicatat kembali setelah wawancara selesai dilakukan. Setelah proses pencatatan selesai barulah dilakukan interpretasi dan analisis data.

Dalam melakukan wawancara, penulis menemui kemudahan dan kesulitan. Adapun kemudahan dalam melakukan wawancara yaitu, ketika penulis sudah bisa melakukan wawancara, informan yang diwawancarai terbuka untuk membuka informasi, kecuali informasi yang benar-benar privasi dan tidak boleh diberitahukan kepada publik termasuk kepada penulis yang melakukan penelitian. Adapun kesulitan penulis dalam melakukan wawancara yaitu awalnya Satpol PP perempuan tidak bersedia untuk diwawancarai, setelah penulis meyakinkan informan bahwa informasi ini hanya untuk keperluan penelitian akhirnya informan bisa diwawancarai.

c. Studi Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip, photo, video berupa data yang didapatkan di kantor Satpol PP.

5. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data. Triangulasi data dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dari sumber yang berbeda, pertanyaan yang sama penulis ajukan pada informan yang berbeda untuk mendapatkan data yang valid dengan melakukan cek dan ricek terhadap data.²³

²³Sadrwan, Danin. 1988. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia

Data dianggap valid apabila data yang diperoleh sudah memberikan jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah diajukan. Data yang dianggap valid kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara akademis dan metodologis.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data secara terpoladalam beberapa kategori. Data yang telah didapatkan dari penelitian di lapangan dikelompokkan dengan baik sehingga akan sistematis dan terstruktur dengan baik.²⁴

Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara kemudian dikumpulkan sehingga menjadi kelompok-kelompok. Data tersebut disusun secara sistematis dan terstruktur yang disajikan secara deskriptif. Dalam melakukan analisis ini penulis menginterpretasikan data yang diperoleh dari awal penelitian sampai pada akhir penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara berurutan. Adapun analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:²⁵

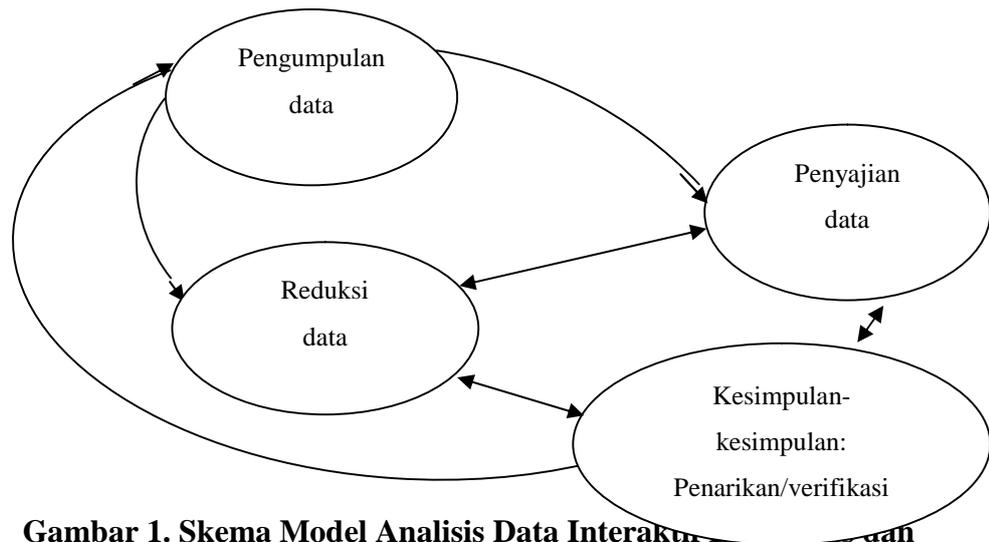
1. Reduksi data. Laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. laporan ini perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan

²⁴Bugin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

²⁵Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. "*Metodologi Penelitian Sosial*". Jakarta : Bumi Aksara. Hal 85-88.

fokus penelitian, kemudian mencari temanya. Data yang didapat dari lapangan kemudian ditulis dengan rapi, rinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.

2. Display data. Display data adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan atau tabel. Dengan melakukan display data dapat memberikan gambaran menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis mengenai tema penelitian. Pada tahap *display* data ini, penulis berusaha menyimpulkan melalui data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi sebelumnya. Agar didapat data-data yang akurat, data-data dikelompokkan ke dalam tabel dan tabel ini akan membantu peneliti dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian atau penyajian data ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap masalah penelitian.
3. Penarikan kesimpulan. Penulis menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting. Jika dirasa sudah sempurna, maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir mengenai peran yang dilakukan oleh perempuan ketika bekerja sebagai Satpol PP di Kota Padang.



Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif dan Penarikan Kesimpulan Huberman.²⁶

²⁶Ibid, Hal 99